

MATINYA MESIN PARTAI POLITIK

(Studi Kasus Pencalonan Syahri Mulyo dalam Pilkada Kabupaten Tulungagung 2013)

Oleh:

Putri Hergianasari¹

ABSTRACT

Effective political mobilization in the elections able to overcome various obstacles, so that the candidates can campaign more effectively in order to achieve the award. Because of the fierce competition, each candidate would increasingly need the right strategy, which can better ensure effectiveness and efficiency. This study chose Tulungagung election as a test site, with a couple SAHTO study subjects (Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo). Syahri Mulyo is one of eight cadres PDIP candidates in this election, but his appearance Tulungagung seen as an achievement in the history of election battle Tulungagung PDIP which is a mass base. This is due to socio-cultural background of the people who mataraman of Tulungagung tend nationalis and abangan.

Interestingly, Syahri Mulyo escaped the verification and win despite not being carried from the PDIP is a strong party in Tulungagung and precisely in the stretcher by PKNU. Because private network that is rooted candidates strong one is botoh networking which are relatives. The networks are not acquired overnight, but has been through a long process that is relational relationships with constituents at the time long before the campaign period.

This gives a reference, that the non-party approach can be made effective and appropriate for the area and know the local culture and the role of institutional approach was replaced by a weaker party the role of non-electoral party.

Keywords: *Political Mobilization, Elections, Non Party Approach, Networks*

¹ Staf pengajar Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana

1. LATAR BELAKANG

Pencalonan kepala daerah menjadi kompetisi ketat yang melibatkan mobilisasi kelembagaan melalui partai. Salah satu cara untuk mempengaruhi pemilih dalam suatu pencalonan atau kontestasi politik yaitu dengan cara mobilisasi politik. Partai politik dianggap merupakan instrumen mobilisasi politik yang aktif. Meskipun partai politik menjadi pelaku aktif dan penting dalam proses demokrasi elektoral, namun informasi mengenai peran kandidat sesungguhnya dalam memobilisasi dukungan pemilih masih sedikit disajikan. Dalam perspektif seperti ini bagaimana partai politik melakukan proses penggalangan massa atau mobilisasi politik perlu diungkap lebih mendalam melalui suatu penelitian.

Huntington dan Nelson berpendapat bahwa institusi elektoral yang paling dekat melakukan fungsi mobilisasi politik adalah partai politik. Mengacu pada proses, keduanya berargumentasi bahwa mobilisasi politik baik yang dilakukan partai atau pemerintah, menghasilkan tindakan politik yang termobilisasi dan tidak otonom karena dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari luar individu.²

Kontestasi politik berlangsung di Kabupaten Tulungagung tahun 2013 lalu yang diikuti oleh empat pasang calon yaitu pada nomer urut satu adalah pasangan Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (SAHTO) yang diusung oleh partai PKNU, Patriot dan PDP. Sedangkan pasangan calon dengan nomer urut dua adalah M.Athiyah-Budi Setiadi (ABDI) yang diusung oleh partai Partai Hanura, Gerindra dan Republikan. Pasangan calon nomer urut tiga adalah Isman-Tatang Suhartono (MATANG) yang diusung oleh partai PDIP dan PKB.

² Huntington, S.2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta:Grafindo Press.

Untuk mengungkapkan bagaimana kandidat menggunakan instrumen mobilisasi politik berbasis partai atau non partai untuk mendukung proses pencalonannya, maka fokus penelitian ini mengangkat pencalonan Syahri Mulyo sebagai studi kasus. Peneliti tertarik menganalisa pencalonan pasangan nomer urut satu yaitu Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo (SAHTO) berangkat dari ketertarikan bahwa Syahri Mulyo adalah salah satu dari delapan kader dari PDIP dan Komisi D DPRD Jawa Timur yang mencalonkan diri tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari PDIP.

Walaupun tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP, Syahri Mulyo tetap maju dengan menggandeng partai-partai kecil yaitu PKNU, PDP dan Patriot yang dibantu oleh masyarakat. Syahri Mulyo memperoleh kemenangan dengan memanfaatkan secara maksimal ketokohnya dan jaringan-jaringan sosio kultural yang dikuasainya, termasuk menggunakan relawan serta *botoh-botoh*³ politik. Syahri Mulyo juga memanfaatkan secara maksimal hubungan emosional masyarakat.

Kegiatan mobilisasi politik dalam kontestasi politik yang Syahri Mulyo lakukan tidak hanya dilakukan melalui jalur partai politik saja, tetapi pada jalur non partai politik juga. Ini terbukti dengan adanya partai politik yang hanya digunakan sebagai kendaraan politik bagi calon-calonnya, yaitu pada pilkada Kabupaten Tulungagung pada kemenangan pasangan Syahri-Maryoto, sehingga peran partai politik disini menjadi menurun dan kehilangan fungsinya. Dengan berdasarkan keadaan tersebut peneliti mengajukan pertanyaan penelitian: Apakah

³ *Botoh* merupakan bahasa Jawa yang artinya "Penjudi". Seseorang yang melakukan perjudian. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka

penggunaan instrumen mobilisasi politik untuk pencalonan tersebut menunjukkan pergeseran sekaligus degradasi peran elektoral partai?

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, peneliti menggunakan teori pelebagaan politik partai sebagai acuan teoritik untuk membangun argumen bahwa mobilisasi politik partai mengimplikasikan adanya pelebagaan partai yang kuat. Mengingat semua partai politik berpeluang melakukan mobilisasi politik partai untuk kepentingan pencalonan, namun dalam realitasnya tidak semua partai politik memiliki pelebagaan politik yang kuat serta menunjukkan keberfungsian sub-sub sistem dalam partai guna mendukung kegiatan mobilisasi politik tersebut.

Pilihan teoritik ini untuk mengungkapkan apakah penggunaan instrumen mobilisasi politik untuk pencalonan tersebut menunjukkan pergeseran dan peran jaringan elektoral partai. Teori pelebagaan politik partai relevan untuk mengungkapkan permasalahan yang diambil dari gagasan Mainwaring dan Torcal, serta Randall dan Svasand. Pelebagaan politik menurut Mainwaring dan Torcal dalam buku "*Political Party*" Katz dan Crotty adalah menggambarkan situasi dimana partai politik dan prosedur-prosedurnya memperoleh stabilitas keorganisasiannya.⁴

Sedangkan menurut Randall dan Svasand pelebagaan partai politik ialah proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya.⁵ Randall dan

⁴ Katz, Richard S; Crotty, William. 2006. Handbook of Party Politics. London: Sage Publication.

⁵ Randall, Vicky; Svasand, Lars. Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics dalam Handbook Of Party Politics, Vol.8 No.1, London: Sage Publication 2002 hal 5-29.

Svasand juga mempertimbangkan bahwa kriteria pelembagaan politik partai dapat dilihat dari ada tidaknya gejala subordinasi partai ke dalam kepemimpinan personal.

Randall dan Svasand berpendapat bahwa pelembagaan partai politik yang kuat akan memiliki kesempatan untuk melakukan pendalaman dan pengakaran pada tingkat massa. Proses pendalaman dan pengakaran ini merupakan langkah penting agar partai politik dikenal oleh para pemilihnya. Tanpa pendalaman dan pengakaran, kapasitas organisasi partai politik untuk menggerakkan instrumen mobilisasi politiknya secara meluas akan terhambat.

Pilihan strategi mobilisasi politik apa yang dilakukan partai politik juga dipengaruhi oleh karakter partai politik di Indonesia yang bercorak partai massa. Corak partai massa ini mendorong partai politik untuk melakukan teknik mobilisasi politik yang bertujuan untuk menghadirkan massa sebesar-besarnya. Kecenderungan mobilisasi politik di negara-negara demokrasi maju yang umumnya menghadapi problem penurunan jumlah pemilih bukanlah strategi mobilisasi murni sebagaimana mengikuti model mobilisasi politik Karp dan Banducci. Pada kasus di Amerika Serikat misalnya, strategi mobilisasi politik elektoral yang menjadi pilihan partai Republik dan Demokrat lebih bercorak pendekatan *canvassing*. Strategi ini menekankan pada peran partai untuk melakukan kontak-kontak dengan pemilih potensial agar hadir memberikan suara mereka pada hari pemilihan.⁶ Strategi *canvassing* ini dianggap efektif karena dirancang untuk menggarap dan mendatangi para pemilih potensial dan mempengaruhi mereka agar menjadi pemilih partisan.

⁶ Wielhouwer, Peter W. The Mobilization of Campaign Activist by the Party Canvass dalam American Political Quarterly Volume 27 No.2 April 1999.

Meminjam istilah Duverger, partai politik yang kuat tentu akan mampu melakukan penetrasi teritorial sebagai bagian dari pengembangan cabang-cabang (*branches*) di luar induk organisasi partai.⁷ Keberhasilan partai politik untuk memiliki kelembagaan yang kuat dan mengakar ini berdampak pada dua hal yaitu akan memperkuat stabilitas partai politik dalam menghadapi kompetisi kepartaian dan memperkuat kemampuan partai politik untuk mempertahankan sumber-sumber dukungan elektoral.

Pelebagaan politik di PDIP tergolong lemah. Secara institusional, partai ini cenderung berada di bawah subordinasi kepemimpinan personal. Namun dalam realitanya, PDIP mampu menempati posisi teratas dalam perolehan suara pada pemilu 1999, mengalahkan Golkar yang dianggap memiliki pelembagaan politik yang kuat.

Pada kondisi tertentu benar bahwa ukuran pelembagaan politik partai yang kuat dapat dilihat dari berkurangnya elit personal dalam pengelolaan partai. Personalisme tidak selalu akan memperlemah kemampuan mobilisasi politik elektoral suatu partai politik. Berbeda dengan gagasan mengenai perlunya kekuatan kelembagaan keorganisasian partai politik, pengalaman PDIP menunjukkan bahwa mobilisasi politik tidak harus dipahami berangkat dari asumsi mengenai ketokohan institusi partai.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dikemukakan di depan yaitu apakah penggunaan instrumen mobilisasi politik untuk pencalonan tersebut menunjukkan pergeseran sekaligus degradasi

⁷ Duverger, M. 1959. *Political Parties Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen & Co.

peran elektoral partai. Maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan adalah **pertama**, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, **kedua**, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Dan **ketiga**, metode ini dapat mengatasi dan adaptasi terhadap pengaruh-pengaruh yang tajam dan terhadap nilai-nilai yang berpengaruh lainnya.⁸

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kabupaten Tulungagung yang letaknya di pesisir pantai Selatan Jawa Timur mempunyai latar belakang sosio kultural mataraman, yang identik dengan masyarakat abangan yang merupakan salah satu basis PDIP terbesar di Jawa Timur.
2. Merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang mempunyai paguyuban-paguyuban tradisional.
3. Syahri-Maryoto merupakan salah satu kandidat yang berangkat dan berideologi PDIP dari calon-calon lainnya yang berideologi PDIP.
4. Merupakan salah satu pasangan pilkada di Jawa Timur yaitu Syahri-Maryoto yang instrumen mobilisasi politik non partai yaitu jejaring botoh politik dan memanfaatkan ketokohan.

Peneliti disini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai penentuan informan terkait dengan judul yang diteliti. Penulis menentukan informan sesuai dengan yang terkait yaitu:

1. Pasangan Syahri-Maryoto (SAHTO).
2. Tim sukses atau tim kampanye pasangan Syahri-Maryoto (SAHTO).
3. Partai politik pengusung pasangan Syahri-Maryoto (SAHTO) yaitu ketua DPW PKNU Jatim dan Sekertaris DPW PKNU Jatim.

⁸ Lexi J. Moleong.2010.Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

4. Ketua DPD PDIP Jatim dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Tulungagung.
5. Ketua KPUD Kabupaten Tulungagung.
6. Instrumen mobilisasi politik pencalonan non partai yaitu botoh politik yang bermain dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2013 pada pasangan Syahri-Maryoto (SAHTO).
7. Ketua Paguyuban Warung Kopi, ketua Paguyuban Langen Tayub, dan paguyuban tradisional lainnya yang mendukung data penelitian tentang pilkada Kabupaten Tulungagung 2013.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Sosio Kultural Masyarakat Tulungagung

Bab ini menyajikan informasi dasar mengenai kaitan aspek-aspek sosio kultural masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap ideologi partai politik mereka serta mengenai pilkada Kabupaten Tulungagung 2013. Substansi bahasan ini berbeda dengan kajian literatur-literatur sebelumnya yang membahas mengenai kaitan-kaitan budaya dan sosial. Kajian tersebut belum menjelaskan informasi spesifik yang dibutuhkan peneliti yang menjelaskan tentang adanya kaitan aspek-aspek sosio kultural dengan pembentukan kekuasaan politik baik formal maupun informal dalam konteks pilkada politik lokal Kabupaten Tulungagung.

Peluang ini yang ingin dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjelaskan bagaimana sumbangan situasi sosio kultural masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap konstruksi politik kepartaian khususnya di Kabupaten Tulungagung. Fokus bahasan dalam bab ini dibutuhkan sebagai pintu masuk untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi latar belakang instrumen mobilisasi politik pencalonan Syahri Mulyo pada pilkada Kabupaten Tulungagung 2013.

Misnan selaku Ketua Paguyuban Warung Kopi di Kecamatan Kauman yang mempunyai massa dan pengaruh di Kecamatan Kauman. Misnan mengatakan bahwa masyarakat terutama laki-laki yang singgah di warung kopi dan merupakan pelanggan tetap di gerakkan olehnya untuk melakukan taruhan mengenai siapa yang menjadi pemenang dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2013. Misnan menjagokan Syahri Mulyo dengan alasan seperti yang dia kemukakan sebagai berikut:

"Sebelum adanya pilkada, Pak Syahri sudah menyusun setiap kepala warkop untuk mempunyai koperasi yaitu Koperasi Mega Jaya. Beranggotakan 20 orang. Jumlah warung kopi di Kecamatan Kauman kurang lebih 200 buah. Mengapa saya memilih menjagokan Pak Syahri karena orangnya supel, patut untuk dipilih, dari awal sudah bergaul dengan masyarakat, orangnya tulus, berideologi PDIP tulen walaupun berangkat dari partai lain untuk mencalonkan diri di pilkada. Sebelum menjelang hari H pemilihan itu sebagian besar anggota dewan dikumpulkan oleh Pak Syahri di hotel Swaloh. Saya pun diundang dan ditanyai oleh beliau untuk dapat mengumpulkan berapa suara. Dan saya menjawab 1 desa sekitar 750 orang. Dan ternyata saya dapat memperoleh 867 suara di desa saya".

Hal ini membuktikan bahwa jauh hari sebelum pilkada Kabupaten Tulungagung 2013 diselenggarakan, Syhri Mulyo secara diam-diam memobilisasi massa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyusun instrumen mobilisasi yang digunakan dalam pencalonannya. Pendekatan ini merupakan salah satu langkah Syahri Mulyo untuk membangun jejaring politik pribadinya. Misnan yang sudah kenal dengan Syahri Mulyo dan Bapak Dasar dari dulu karena ikatan ketergantungnya dengan Syahri Mulyo yang rutin mensuplai kebutuhan warung kopinya. Hal ini membuktikan bahwa ikatan *patron-clien* kental dalam hubungan Misnan dengan Syahri Mulyo. Peran Misnan dalam pencalonan Syahri Mulyo cukup signifikan, ini di buktikan dengan pengakuannya sebagai berikut:

"Peran saya yaitu terjun ke masyarakat kecil mbak, pendekatan pada kaum tua dan muda, apa saja permintaan masyarakat untuk lingkungan saya siap mengajukan di kecamatan melalui Pak Supriyono selaku ketua DPC PDIP. Pada saat itu ada kejadian, anak buah saya main ke waduk Wonorejo dan terdapat huru-hara karena main ke sana harus membayar uang masuk, tapi masalah ini dapat diatasi berkat Pak Syahri Mulyo. 85% penduduk sekitar waduk adalah massa PDIP. Figur dan latar belakang Isman memang PDIP tetapi dia berpolitik melewati kenyataannya. Mementingkan kepentingannya sendiri. Masyarakat meminta bantuan untuk lingkungan melalui dia, hanya mersepon dengan jawaban "iya" tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Kalau Syahri Mulyo memang terbukti pilihan masyarakat, saya mendatangi rumah ke rumah dan warung ke warung untuk memberikan masukan kepada masyarakat tentang sosok Syahri Mulyo. Syahri Mulyo juga mendatangi warung-warung untuk memberikan masukan mengenai siapa yang pantas untuk dipilih. Beliau juga memberikan pemasukan untuk kebutuhan-kebutuhan warung-warung kopi. Beliau mencalonkan diri dalam pilkada meminta bantuan warung-warung kopi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Beliau merangkul masyarakat paguyuban warung kopi. Terlepas dari cafe-cafe dan tempat karaoke lainnya mempunyai paguyuban sendiri juga mbak."

Dari pernyataan Misnan tersebut menguatkan peneliti untuk menganalisis bahwa memang terdapat hubungan timbal-balik. Misnan yang bersedia menggerakkan massanya untuk pencalonan Syahri Mulyo rupanya memperoleh imbalan yang sepadan. Massa PDIP yang seharusnya mendukung pasangan Isman-Tatang (MATANG) ternyata mendukung Syahri Mulyo dengan alasan bahwa ketokohan atau figur Syahri Mulyo yang populer di kalangan masyarakat menengah kebawah.

Misnan merupakan salah satu botoh politik yang memobilisasi massanya untuk kemenangan Syahri Mulyo. Ini dibuktikan dengan peneliti melontarkan pertanyaan mengenai siapa saja yang berperan sebagai botoh politik dalam pencalonan Syahri Mulyo. Hal ini dibuktikan dengan pernyataannya Misnan sebagai berikut:

"Saya ini murni melawan mbak, tetepi ikhlas mengeluarkan uang saya sendiri untuk menjagokan Syahri Mulyo. Kalau botoh-botoh politik yang sering di ungkap di media massa itu sebenarnya tidak ada kok. Yang ada itu konsultan politik tradisional dengan pola taruhannya itu namanya "ngapit" 1:2 dengan lawannya. Pak Syahri Mulyo dibuat taruhan atas, yang dimaksud adalah kalau menang Syahri Mulyo,teman-teman saya

yang menjagokan Syahri Mulyo menang 1 dan kalau yang menang lawan, yang jago Syahri Mulyo harus bayar 2x lipat, jadi otomatis yang berjuang untuk kemenangan Syahri Mulyo itu mati-matian giat mbak. Tapi uang modal awal dari Mbah Dasar."

Dari pernyataan di atas, ternyata Misnan memang merupakan salah satu botoh politik yang digerakkan oleh Syahri Mulyo dan Bapak Dasar. Misnan merupakan botoh politik yang memang mempunyai hubungan pribadi dengan calon, bukan sebagai botoh yang pragmatis bermain judi hanya semata-mata untuk memperoleh kemenangan terlepas siapa saja nantinya yang menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Tulungagung 2013. Tetapi dia tidak mau disebut dirinya sebagai botoh melainkan sebagai konsultan politik tradisonal. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataanya sebagai berikut:

"Saya bisa membantu sebisa mungkin untuk menggalang massa, sesuai kemampuan saya, untuk mencalonkan menjadi kepala desa sampai bupati pun saya bisa membantu, tetapi dengan syarat meminta imbalan untuk memberikan bantuan berupa penerangan yaitu lampu jalan untuk desa saya dan perbaikan jalan untuk desa saya."

Tidak hanya di tingkat pilkada saja, tetapi Misnan juga sudah biasa untuk menjadi botoh politik dalam pemilihan politik lainnya. Tetapi dengan syarat dan imbalan yang sesuai dengan apa yang sudah dia perjuangkan. Hal ini memperkuat bahwa unsur transformasi ketokohan menuju politik praktis perlu ditampilkan untuk menjelaskan bahwa pembentukan kepartaian di Kabupaten Tulungagung dapat dilacak dari pengentalan aspek-aspek sosio kultural menjadi kekuatan informal politik.

Dalam bentuk konkritnya, informal politik hadir dalam sosok ketokohan serta jaringan kekerabatan yang dijadikan kekuatan penghubung seseorang dalam relasi kekuasaan formal politik. Sorotan terhadap aspek sosio kultural termasuk ketokohan diharapkan akan

menghasilkan cara pandang yang berbeda di Kabupaten Tulungagung, dan kekuatan politik apa saja yang sebenarnya mempengaruhi partai-partai politik tersebut. Penajaman pada peran aspek sosio kultural serta kekerabatan akan menjadi pembeda dengan kajian-kajian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, aspek sosio kultural dan kekerabatan dimaknai sebagai penguasaan atas sumber-sumber yang bersifat sosial dan kultural dalam kaitannya pada proses pembentukan kekuasaan dan tindakan politik di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian sumber-sumber sosio kultural sebagaimana disebut diatas dapat berfungsi sebagai pengantar bagi pembentukan dan penguatan posisi pengaruh politik seseorang dalam masyarakat.

Fungsi transformasi sumber sosio kultural, kekerabatan serta ekonomi, terdapat di dalam figur Bapak Dasar yaitu bapak dari Syahri Mulyo. Bapak Dasar merupakan seorang tengkulak buah yang besar di Kecamatan Ngantru. Karena posisinya sebagai orang yang memiliki anak buah, maka ia dikategorikan sebagai orang yang penting, sehingga dapat memobilisasi anak buah dan masyarakat yang mengenalnya untuk mencari dukungan kepada para toko buah melalui kepengaruhan juragan buah tersebut.

Peran ketokohan elit ekonomi yang dimiliki Bapak Dasar memiliki pengaruh pada skala desa maupun antar desa. Dalam sifatnya yang lebih politis, elit ekonomi ini dapat dikaitkan dengan keterlibatannya dalam konteks kepolitikan lokal, baik dalam dimensi formal maupun informal di Kabupaten Tulungagung.

4.2 Jaringan Ketokohan

Kemenangan Syahri Mulyo pada pemilihan umum kepala daerah atau pilkada Kabupaten Tulungagung tidak lepas dari peran para botoh. Ayah kandung Syahri Mulyo yaitu Dasar selama ini dikenal sebagai

botoh kawakan, Bapak Dasar sering memenangkan jagonya dalam pemilihan kepala desa. Pernyataan ini diungkapkan oleh Syahri Mulyo bahwa dia dibantu bapaknya dan teman-temannya sesama botoh. Jaringan botoh di Kabupaten Tulungagung dibawa bapaknya untuk mendukungnya. Para botoh mempunyai kelebihan sebagai tim pemenang pilkada. Mereka dapat memetakan kekuatan dukungan di setiap desa. Syahri Mulyo mengatakan bahwa para botoh memberikan laporan wilayah *swing voters* ke timnya dan itulah yang mereka garap secara serius.

Syahri Mulyo yang berpasangan dengan Maryoto tidak menggunakan konsultan pilkada. Namun, berkat masukan dari para botoh Syahri Mulyo merancang strategi kampanye. Para botoh pula yang dilibatkan dalam sebuah survei untuk mengetahui tingkat elektabilitasnya. Menurut Syahri Mulyo bahwa sebulan yang lalu survei menunjukkan suaranya kalah di kecamatan Bandung. Dari masukan para botoh kondisi tersebut bisa mereka balik dan Syahri Mulyo menang mutlak disana.

Dari keterangan di atas botoh mempunyai peran yang besar untuk kemenangan Syahri Mulyo. Syahri Mulyo membantah anggapan orang bahwa botoh adalah para penjudi, menurutnya mereka adalah konsultan politik tradisional tingkat desa dan membantu jagonya untuk menang. Botoh politik tersebut merupakan jaringan dari Bapak Dasar yang merupakan tokoh masyarakat yang berpengaruh di kabupaten Tulungagung, selain mempunyai modal kapital yang besar, Bapak Dasar juga mempunyai modal sosial yang kuat.

Hal ini terbukti loyalitas pengikutnya yang bersedia menjadi konsultan politik tradisional untuk kemenangan Syahri Mulyo. Konsultan politik tradisional atau yang lebih dikenal dengan botoh politik ini menyebar di kecamatan-kecamatan untuk bermain dengan

lawan politiknya. Berikut daftar konsultan politik tradisional (botoh) politik yang bermain dalam pemenangan Syahri Mulyo pada pilkada Kabupaten Tulungagung 2013:

1. Dasar, merupakan bapak dari Syahri Mulyo, dia mempunyai usaha yaitu sebagai tengkulak buah yang kuat di Kabupaten Tulungagung dan mempunyai SPBU di daerah Ngantru. Dia merupakan pengikut PNI, mempunyai loyalitas dan solidaritas yang kuat, dia adalah senior botoh yang tersebar sampai di wilayah Blitar dan Kediri. Dia juga mempunyai koperasi simpan pinjam. Dia menguasai wilayah Kabupaten Tulungagung Utara.
2. Adi Suroso, merupakan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Tulungagung Kelurahan Kepatihan. Dia menguasai wilayah Kabupaten Tulungagung kota. Adi Suroso mempunyai usaha yaitu buka warung sate kambing di rumahnya, dan mempunyai usaha sebagai pemborong kusein dan perabotan kayu lainnya. Adi Suroso merupakan ketua Paguyuban Langen Tayub di Kabupaten Tulungagung. Dia mempunyai modal sosial yang kuat di lingkungan perjudian dan hiburan rakyat. Peneliti diundang oleh Adi Suroso untuk menghadiri syukuran kemenangannya dalam perjudian yang menjagokan Syahri Mulyo.
3. Misnan, merupakan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Pucangan. Misnan mempunyai usaha buka warung kopi di rumahnya dan dia merupakan Ketua Paguyuban Warung Kopi yang ada di Kecamatan Kauman. Dia merupakan tokoh masyarakat yang terkenal di kalangan warung kopi. Dia menguasai wilayah Kecamatan Kauman dan wilayah Kabupaten Tulungagung bagian Barat. Modal sosial sangatlah banyak di sana. Dia mengatakan bahwa yang membantu dia menjadi Ketua Paguyuban Warung

Kopi adalah Bapak Dasar. Bapak Dasar juga yang memberikan pinjaman modal untuk membuka warung kopi tersebut.

4. Soim, merupakan warga kecamatan Bandung, yang menguasai wilayah Kecamatan Bandung, kecamatan Campur Darat, Kecamatan Besuki dan Kecamatan Boyolangu. Dia menguasai Kabupaten Tulungagung wilayah Selatan. Dia merupakan pengusaha jual beli tanah di daerah Bandung. Mempunyai usaha industri batu marmer. Anak buah dan karyawannya di daerah tersebut banyak. Dia merupakan kerabat dari Bapak Dasar dan berteman baik dengan Adi Suroso.
5. Edi Krumpul, merupakan tokoh masyarakat, di dalam susuan personalia tim pemenang Syahri Mulyo dia sebagai tim ahli. Selain sebagai tim sukses Edi Krumpul juga bermain dalam botoh politik. Dia merupakan teman dekat Adi Suroso.

Dari data diatas cara yang dilakukan oleh Syahri Mulyo dengan memanfaatkan jaringan botoh politik untuk membangun massa lebih bersifat pribadi. Disini membuktikan bahwa partai politik tidaklah penting bagi calon. Makna politik dibalik jaringan pribadi dan ketokohan yang digerakkan oleh Bapak Dasar terletak pada kontribusi yang sifatnya langsung atau tidak langsung terhadap proses pembentukan jaringan politik yang dilakukan oleh massa masing-masing botoh. Disini Bapak Dasar meminta para botoh politik untuk beradu dan bertaruh menjagokan Syahri Mulyo. Dengan sistem "*ngapit*" yaitu apabila Syahri Mulyo menang, botoh berarti menang satu dan apabila Syahri Mulyo kalah, para botoh politik harus membayar lawannya yang menang yaitu dua kali dari uang yang dipertaruhkan dan uang taruhan dibawa oleh bandar. Dari hasil kesepakatan ini para botoh politik giat untuk menghimpun massa yaitu pengikutnya, karyawan, saudara, keluarga, tetangga, kerabat untuk mendukung Syahri Mulyo agar mereka

memenangkan pertarungan. Kampanye di desa-desa dengan menyumbang perlengkapan warung kopi dan membuat baleho-baleho, sepanduk, selebaran dilakukan oleh botoh dengan biaya sendiri.

Mobilisasi terkadang dianggap sebagai sebuah kondisi awal dari evolusi menuju partisipasi politik. Partisipasi politik dianggap sebagai kondisi ideal sebuah iklim demokrasi yang baik. Namun pada praktiknya hal tersebut tidak selamanya berjalan seperti itu. Hasil dari kajian tentang mobilisasi dan partisipasi yang dilakukan oleh Jeffrey A. Karp and Susan A. Banducci di negara-negara yang telah lama menjalankan sistem demokrasi (seperti Jerman, Denmark, Australia Islandia, Israel, Spanyol, Swedia, Belgia, Irlandia, New Zealand, Norwegia, Finlandia, Prancis, Amerika, Portugal, Switzerland) dan di negara-negara yang baru menjalankan sistem demokrasi (Brazil, Hungaria, Bulgaria, Korea, Czech Republic, Mexico, Polandia) dinyatakan bahwa mobilisasi terjadi bukan hanya pada *new democracy* tetapi juga pada *old democracy*.⁹

4.3 Peran Elektoral Partai: Degradasi

Sub bab ini akan memaparkan implikasi teoritik dari temuan-temuan pada bab sebelumnya yang diramu untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bab I, yaitu apakah penggunaan instrumen mobilisasi politik untuk pencalonan tersebut menunjukkan pergeseran sekaligus degradasi peran elektoral partai.

Perspektif untuk membantu mengungkap peran PKNU dalam kegiatan memobilisasi politik untuk pencalonan dapat dilakukan dengan mempelajari karakteristik internal partai tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya terhadap perilaku elit partai dalam menghadapi

⁹ Karp, Jeffrey A; Banducci, Susan A. Party Mobilization And Political Participation In New And Old Democracies dalam America Political Reasearch Sage Publications 2007

kompetisi pemilihan. Karakteristik internal partai tersebut bertolak dari genesis partai tersebut yang secara kultural dan struktural berbeda dengan karakteristik masyarakat Kabupaten Tulungagung yang nasionalis sedangkan PKNU bercorak Islam.

Pada pemilu-pemilu sebelumnya PDIP memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pada waktu pilkada Kabupaten Tulungagung 2013 ini kemenangan Syahri Mulyo yang di gandeng oleh PKNU menandakan terjadi perubahan pilihan politik masyarakat Kabupaten Tulungagung yang cukup signifikan. Perubahan pilihan politik tersebut dapat diinterpretasikan secara beragam, diantaranya adanya intervensi peran ketokohan sosial ekonomi Bapak Dasar yang sebagai tengkulak dalam masyarakat menengah kebawah yang populer dan berpengaruh atau secara objektif memang telah terjadi pergeseran haluan politik di kalangan masyarakat Kabupaten Tulungagung sendiri.

Namun yang jelas, kekalahan PDIP di dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2013 tersebut menimbulkan kegoncangan politik internal dalam PDIP, karena secara tidak langsung basis-basis suara PDIP dan pola sosio kultural nasionalis politik yang pernah dibangun akan terancam oleh figur ketokohan dan bukan kepartaian. Terdapat beberapa skenario faktor yang membuat para pemimpin PDIP tetap yakin bahwa PDIP akan mampu mempertahankan dominasinya dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2013, yaitu melalui label ideologi nasionalis yang melekat pada PDIP dan faktor kesetiaan pengikut atau jaringan massa PDIP.

Perjalanan politik PDIP dahulu di Kabupaten Tulungagung memang sangat dominan dan dalam beberapa hal sangat diuntungkan oleh klaim PDIP identik dengan budaya mataraman dan mataraman identik dengan kultur masyarakat Kabupaten Tulungagung. Selain faktor

tersebut, PDIP juga diuntungkan dari memanfaatkan jaringan klientelisme yang kental di Kabupaten Tulungagung pada waktu itu. Isman yang diusung oleh partai terbesar di Kabupaten Tulungagung ternyata tidak memperoleh suara yang banyak, ini terbukti pada pemilihan tanggal 31 Januari 2013 yang lalu Isman-Tatang memperoleh suara sebesar 14,82 % suara. Menurut Atmojo selaku tim relawan dari Isman-Tatang:

"Strategi Isman-Tatang yang dominan adalah menggantungkan pada partai yaitu PDIP. Mereka juga tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakat secara langsung. Kelompok seniman, kelompok penghayat, paguyuban warung kopi, kelompok adu ayam, kelompok jaranan dan lain sebagainya di Kabupaten Tulungagung ini cukup besar, tetapi tidak dimanfaatkan secara intens oleh Isman-Tatang untuk mengambil hati konstituen."¹⁰

Secara ekonomi Isman-Tatang lebih mementingkan pendekatan elit politik internal struktural untuk memperoleh rekomendasi dari partai PDIP di Kabupaten Tulungagung alhasil cara ini ampuh dan mendapatkan rekomendasi dari DPC PDIP. Akan tetapi mereka lupa bahwa tidak hanya dengan pendekatan elit politik mereka bisa memperoleh suara banyak tetapi pendekatan pada konstituen paling yang penting. Seperti yang diungkapkan oleh Atmojo selaku relawan dari Isman-Tatang:

"Dasar awal ikatan Syahri Mulyo dengan sosial masyarakat Kabupaten Tulungagung memang kuat dan dari banyak kalangan yaitu dari kelompok seniman, kelompok penghayat, Paguyuban Warung Kopi, kelompok adu ayam, group jaranan yang memang secara formal dan informal adalah massa dari Bambang Karjono yaitu calon kandidat pilkada yang gagal verifikasi. Massa Bambang Karjono berpindah ke Syahri Mulyo walaupun secara formal Bambang Karjono mendukung Isman-Tatang karena mendapat rekomendasi dari PDIP."

¹⁰ Atmojo relawan Isman-Tatang (PDIP). Panglima Sudirman VII0/110 Tulungagung 5-3-2013 18.10 wib

Menurutnya kesalahan elit politik PDIP dalam menentukan rekomendasi untuk kadernya kurang jeli, dibutuhkan survei terlebih dahulu karena di Kabupaten Tulungagung kepopuleran Isman-Tatang jauh rendah dibandingkan Syahri Mulyo yang sama-sama kader dari PDIP yang unggul di 18 kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Disinyalir DPP PDIP salah menentukan rekomendasi ini berarti terdapatnya organ partai yang tidak sehat.

Masyarakat Kabupaten Tulungagung melihat calon pilkada bukan darimana calon tersebut diusung oleh partai, tetapi melihat figur ketokohan calon tersebut. Ini membuktikan masyarakat Kabupaten Tulungagung mempunyai kemajuan dalam orientasi politik. Sebagai wilayah dengan penduduk yang sebagian besar identik dengan ideologi nasionalis dan sosio kultural yang tinggi dan adanya pola pengakaran budaya yang tinggi pula, keberadaan ketokohan atau figur dari PDIP yaitu Megawati dan Bung Karno sangat membantu perluasan pengaruh PDIP dalam masyarakat Kabupaten Tulungagung pada pemilu 2009.

Hal inilah yang dimanfaatkan Syahri Mulyo dalam memobilisasi massa. Barisan tokoh yang membentengi PDIP bukanlah jaminan kekuatan PDIP di dalam menghadapi Syahri Mulyo yang didukung oleh para botoh politik dan birokrasi yang dikuasai oleh pasangannya yaitu Maryoto Bhirowo selaku mantan sekretaris daerah Kabupaten Tulungagung. Syahri Mulyo juga didukung oleh kekuasaan Bapak Dasar yang memiliki sumber-sumber pendanaan yang besar. Walaupun PDIP di Kabupaten Tulungagung dibesarkan oleh para tokoh masyarakat pada masanya dan PDIP memang berideologi cocok dengan sosio kultur masyarakat Kabupaten Tulungagung, namun kekuatan politis para tokoh PDIP untuk menjadi penjaga loyalitas emosional pemilih dan massanya pelan-pelan mengalami perubahan.

Signifikansi massa PDIP yang meresposisi kepada Syahri Mulyo dalam mendogkrak suara Syahri Mulyo ini sulit diukur. Namun kenaikan suara Syahri Mulyo dalam pilkada Kabupaten Tulungagung 2013 ini sangat mencemaskan para tokoh politik dan relawan setia pendukung PDIP. Bahkan dampak kemenangan Syahri Mulyo menjadi titik didih resistensi massa PDIP terhadap Syahri Mulyo yang telah dipecat dari keanggotaan PDIP.

Fenomena ini dapat ditarik bahwa ketergantungan calon pada ketokohan lebih kuat dari pada calon mengandalkan kekuatan organisasi partai sebagai institusi yang mendukung pencalonannya, yaitu PKNU. Terdapat empat pola tindakan yang dilakukan Syahri Mulyo untuk merebut hati massa. Empat pola ini menggambarkan instrumentalisasi hal-hal yang bersifat sosio kultural sebagai sarana Syahri Mulyo untuk membangun legitimasi budaya.

Pertama, Bapak Dasar merupakan orang yang populer dikalangan masyarakat Kabupaten Tulungagung terutama kelas menengah-kebawah. Dia merupakan *Strong Man* yang mempunyai modal kapital yang kuat dan mempunyai anak buah atau karyawan dalam usahanya sebagai tengkulak buah. Hubungan ini merupakan hubungan *patron-clien* antara Bapak Dasar dengan karyawan dan anak buahnya. Situasi ini dimanfaatkan Bapak Dasar untuk untuk membentuk jaringan botoh guna memperoleh dukungan.

Kedua, jalinan kedekatan kepada masyarakat dibentuk melalui kedekatan relasi pedagang-tengkulak, yaitu Bapak Dasar sebagai tengkulak. Dalam posisi tersebut, hubungan emosional antara Bapak Dasar dengan pedagang terjadi karena transaksi jual beli yang sering dilakukan. Hubungan ini akan terus terpelihara selama kedua belah pihak bertransaksi dalam perdagangan. Aspek penting dari hubungan tersebut diwujudkan dalam sikap saling menghormati. Sikap saling

menghormati seperti ini tidak saja untuk urusan-urusan sosial ekonomi namun juga dimanfaatkan oleh Bapak Dasar untuk meminta dukungan dan suara menyangkut pencalonan anaknya dalam pilkada.

Ketiga, jalinan kedekatan dibentuk melalui aspek kekerabatan. Aspek kekerabatan ini menghubungkan antara Bapak Dasar dengan beberapa konstituen yang berpengaruh di desa-desa dalam garis ikatan darah (kin) yang sama. Makna kekerabatan ini begitu mendalam sehingga membuat konstituen secara emosional bangga mempunyai saudara yang mencalonkan diri menjadi bupati. Hal ini dimanfaatkan Bapak Dasar untuk membangun jaringan botoh di daerah tersebut.

Keempat, jalinan kedekatan yang dibentuk melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dimana Syahri Mulyo dipandang berjasa dan layak untuk didukung sebagai calon bupati. Berbeda dengan pola-pola sebelumnya, pola kedekatan ini muncul karena jaringan sosial yang luas dari Syahri Mulyo yang sudah lama dibangunnya dan jasa-jasa yang telah dilakukan Syahri Mulyo. Dalam hal ini, kekuatan jaringan sosial yang berhasil dibangun Syahri Mulyo dan Bapak Dasar menjadi modal sosial untuk dikenal dan dijadikan aset partai pendukungnya sehingga layak untuk direkomendasikan menjadi calon. Faktor ketokohan Syahri Mulyo tipe ini dibangun karena adanya pengakuan dari masyarakat. Bagi Syahri Mulyo, adanya pengakuan dari masyarakat membuka peluang untuk melakukan konsolidasi jaringan politik pribadi sebelum kampanye.

Berdasarkan temuan yang ada terdapat tiga faktor yang menjadi *setting* politik mengapa peran partai menjadi lemah sebagai instrumen mobilisasi politik pencalonan. **Pertama**, calon merupakan anak dari salah satu tokoh masyarakat yang populer di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai modal kapital serta modal sosial yang kuat. hal ini dimanfaatkan calon membentuk botoh-botoh politik untuk

membantunya memenangkan pilkada, yaitu disebut dengan konsultan politik tradisional. **Kedua**, faktor pengenalan calon ke desa-desa yang dijadikan basis elektoral politik yang dilatarbelakangi oleh jaringan politik pribadi yaitu kekerabatan dan figur. **Ketiga**, pertimbangan calon untuk membangun kekuatan elektoral bukan pada kekuatan organisasi partai tetapi pada pertimbangan jaringan pribadi yang digerakkan untuk masuk ke desa-desa yang dijadikan basis dukungannya. Pertimbangan yang menjadi prioritas calon dalam melakukan konsolidasi jaringan politik sangatlah situasional. Hal ini tergantung pada kondisi jaringan politik yang telah dikuasai oleh calon serta pada kondisi sosio kultural masyarakat di daerah pemilihan.

5. KESIMPULAN

Pilkada di Kabupaten Tulungagung 2013 dapat menjadi pintu kebaruaran teoritik dan pendekatan baru bahwa dalam pencalonan semakin menguatkan peran jaringan politik personal kandidat dari pada peran partai politik. Peran ketokohan yang digunakan Syahri Mulyo atas Bapak Dasar dalam kegiatan mobilisasi politik terlihat menguat. Hal ini berarti mencerminkan lemahnya peran organisasi partai dan institusionalisasi politik partai PKNU selaku kendaraan Syahri Mulyo.

Tidak seperti yang digagas oleh Mainwaring dan Torcal maupun gagasan Panebianco yang menyatakan bahwa institusionalisasi politik partai yang kuat ditandai oleh adanya pengakaran partai, prosedur partai yang berjalan stabil, identitas politik pemilih yang kuat serta peran personal elit yang minim.

Huntington dan Nelson berpendapat bahwa institusi elektoral yang paling dekat melakukan fungsi mobilisasi politik adalah partai

politik. Mengacu pada proses, keduanya berargumentasi bahwa mobilisasi politik baik yang dilakukan partai atau pemerintah, menghasilkan tindakan politik yang termobilisasi dan tidak otonom karena dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari luar individu.

Namun institusionalisasi politik partai yang demikian tidak terjadi dalam instrumen mobilisasi politik pencalonan Syahri Mulyo. Peran ketokohan dan jejaring botoh politik begitu berdampak dan penting dibutuhkan Syahri Mulyo sebagai sumber legitimasi sosio kultural dan instrumen mobilisasi politik.

Penelitian ini membutuhkan akses yang cukup baik dengan subyek penelitian. Sebab, berbagai hal yang tercakup di dalam menyelidiki jejaring botoh dalam pilkada tersebut tentu merupakan data-data dan pergerakan secara rahasia yang tidak dapat dibocorkan kepada banyak orang. Beruntung pada penelitian ini peneliti mendapatkan akses yang cukup baik dengan subyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Chalik. Islam Mataraman dan Orientasi Politiknya dalam Sejarah Pemilu Di Indonesia *Islamica*, Volume 5, No. 2, Maret 2011.

Birgitta, Nedelmann. 1987. *Individuals and Parties-Changes in Processes of Political Mobilization European*. Sociological Review. Oxford: University Press.

Blaydes, Lisa; Tarauty, Safinaz El. *Woman's Electoral Participation in Egypt: The Implication of Gender for Voter Recruitment and Mobilization dalam The Middle East Journal*. Washington: Summer 2009. Vol 63 iss.3:364.

Duverger, M. 1959. *Political Parties Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen & Co.

Feith, H & Castles, L (eds). 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.

George Towar Ikbal Tawakkal. 2009. *Peran Partai Politik dalam Mobilisasi Pemilih Studi Kegagalan Parpol Pada Pemilu Legislatif Di Kabupaten Demak 2009*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Hopkin, Jonathan. *Clientelism And Party Politics dalam Handbook Of Party Politics*. Sage Publications London: 2006.

Huntington, S. 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Grafindo Press.

Huntington, S; Nelson, Joan. 1999. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Rinka Cipta.

Jackson, KD & Pye, LW (eds).1978.Political Power and Communication in Indonesia.Berkeley: California University Press.

Karp,Jeffrey A; Banducci, Susan A. Absentee Voting, Mobilization and Participation dalam American Politics Research Volume 29 2001.

Karp,Jeffrey A; Banducci, Susan A. Party Mobilization And Political Participation In New And Old Democracies dalam America Political Reasearch Sage Publications 2007.

Katz, Richard S; Crotty, William. 2006.Handbook of Party Politics. London: Sage Publication.

Mair, Peter. Cleavages dalam Handbook Of Party Politics. London: Sage Publications 2006.

Moleong Lexi J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nuno, Stephen A. Latino Mobilization and Vote Choice in the 2000 Presidential Election dalam American Politics Research (2007) 35(2):273-290.

Pierce, Samuel The Political Mobilization Of Catholic Women In Spain's Second Republic: The CEDA 1931-1936 dalam Journal Of Contemporary History 2010 . Volume 45(1) 23-28

Randall,Vicky; Svasand, Lars. Party Institusionalization in New Democracies, Party Politics dalam Handbook Of Party Politics, Vol.8 No.1, London: Sage Publication2002 hal 5-29

Scott Mainwaring dan Mariano Torcal. Party System Institutionalization and Party System Theory After The Third Wave of Democratization dalam Handbook Of Party Politics. London: Sage Publications 2006.

Suyanto, Bagong;Sutinah.2006.Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tanjung, Akbar.2008.Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wielhouwer, Peter W. The Mobilization of Campaign Activist by the Party Canvass dalam American Political Quarterly Volume 27 No.2 April 1999